

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DIKELURAHAN MAHARATU KOTA PEKANBARU

Oleh :  
**Ibnu Sazmie Arief**  
Email: [Ibnusazmie91@gmail.com](mailto:Ibnusazmie91@gmail.com)

**Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos, M.Si**

Jurusan Administrasi Negara- Konsentrasi Teori Organisasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya jl. H.R. soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru  
288293

Telp/Fak. 0761-63277

## ***Abstract***

*RASKIN program is one of the government's policy to reduce poverty in Indonesia. In the implementation of the program, based on the general guidelines issued annually RASKIN. The general guidelines of the fact the field has not fully follow the General Guidelines RASKIN. Still found a mismatch either in the process of implementation and the implementor implementing the RASKIN program. This study aims to investigate the implementation of the division of RASKIN in Pekanbaru City Village Maharatu and to identify obstacles encountered in the implementation of the RASKIN program in the Village Maharatu Pekanbaru City.*

*In theory policy evaluation by William N. Dunn, There are six variables that form a link between policy and performance, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, Responsiveness, and Accuracy.*

*The method used in this research is qualitative research. With the technique done of validity of the data by triangulation, the key informant in this study. In this study, an informant who is headman of Maharatu, section head of public welfare, chairman and chief pillars of the residents of the neighborhood, as well as urban communities Pekanbaru. Then analyzes the data and manage.*

*Based on the research and discussion that researchers do in the field, it is found that RASKIN Program Implementation in Village Maharatu not implemented to the fullest. That's because a variety of factors that affect the evaluation of these programs is difficult implemented to the fullest.*

**Keywords:** *Evaluation, RASKIN Program, Village Maharatu*

## PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 mengeluarkan data mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan dan perdesaan menurut kelompok barang. Data tersebut menunjukkan bahwa padi-padian dalam hal ini adalah beras masih menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Masyarakat miskin rata-rata membelanjakan 67% pendapatannya untuk makanan, 28% untuk perumahan dan pengeluaran lainnya, serta pendidikan/kesehatan sebesar 5%. Khusus untuk pangan, yang dibelanjakan sekitar 29% adalah untuk beras. Melihat data tersebut, terlihat betapa pentingnya dan besarnya pengeluaran masyarakat untuk membeli beras.

Program Beras Miskin (Raskin) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Instrumen kebijakan dari program Raskin ini adalah Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan penyaluran pangan secara khusus yang diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka, maka diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga

sasaran meningkat serta terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat.

Pada kelurahan Maharatu yang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai, Dari rincian data yang di dapat dari Kantor Kelurahan Maharatu, tercatat 610 Kepala Keluarga yang mendapatkan Beras Raskin. Dari jumlah keseluruhan yang mendapat Raskin terdapat 375 KK (61,4%) berusia antara 51-60 tahun adalah jumlah terbanyak sebagai penerima RASKIN. Umumnya dalam rentang umur tersebut, masyarakat yang mendapat RASKIN berstatus janda ataupun yang tidak memiliki penghasilan lagi karena tidak produktif. Dan daerah yang penduduknya paling banyak mendapatkan Raskin beralamat di Jalan Pahlawan kerja. Permasalahan yang terjadi adalah ketidaktepatan waktu dalam hal pendistribusian Raskin ini, di Kelurahan Maharatu peneliti melakukan prariset dengan mewawancarai 15 RTS yang seluruhnya mengatakan bahwa menerima Raskin pada rentang waktu dua sampai tiga bulan sekali distribusi Raskin tahun 2015, seharusnya RTS tersebut menerima setiap bulannya sesuai dengan Pedum Raskin, dan ada juga RTS yang tahun sebelumnya mendapatkan raskin, tetapi pada tahun ini tidak lagi mendapatkan Raskin. Kemudian permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah jumlah Raskin yang di dapat tidak sesuai dengan Pedum yang di tentukan. Masyarakat mendapat 10-15 Kg dalam kurun waktu tersebut, yang seharusnya mendapatkan jumlah tersebut setiap bulannya. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya sistem “pemerataan” dalam pembagian

Raskin. Hal ini terjadi karena ada KK yang seharusnya masuk dalam kriteria penerima Raskin, tetapi belum terdaftar pada data di Kelurahan. Permasalahan ini terjadi juga karena KK tersebut belum atau tidak memiliki Kartu Keluarga dan KTP Kelurahan Maharatu. Dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengangkat penelitian ilmiah ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”**

### **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dibahas masalah yaitu apakah Program RASKIN di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2015. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah aturan dalam pembagian RASKIN di kelurahan Maharatu sudah tepat?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu?

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **Keadaan Geografis**

Letak dan luas kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} - 14' - 101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Berdasarkan peraturan Pemerintah no 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987. Daerah Kota Pekanbaru mempunyai luas kurang lebih  $632,26 \text{ km}^2$  atau  $0,71 \%$  dari

luas provinsi Riau. Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4

Kota Pekanbaru berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Siak, sebelah selatan Kabupaten Kampar, sebelah Timur Kabupaten Bengkalis dan sebelah Barat Kabupaten Pelalawan. Sementara untuk keadaan geologinya sendiri Kota Pekanbaru relatif daerah datar dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol serta humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

Kota Pekanbaru sendiri dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

## **Gambaran Umum Kelurahan Maharatu**

### **Lokasi**

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai terletak di sebelah selatan Kota Pekanbaru dan dilihat dari arah mata angin posisi wilayah hukum Kelurahan Maharatu adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo.
- Sebelah selatan dengan Desa Kubang Raya Kabupaten Kampar
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Timur.

Luas wilayah 16.982 m<sup>2</sup>. Untuk mengetahui orbitasi, jarak dan waktu tempuh dari Kelurahan Maharatu ke Ibukota Kecamatan jaraknya 3,2 km dengan waktu tempuh 5 – 7 menit, dengan ibukota Pekanbaru jaraknya 9,0 km dengan jarak tempuh 22 – 27 menit dan jarak dengan Ibukota Propinsi 9,5 km dengan jarak tempuh 25 – 30 menit dengan kondisi jalan aspal, hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pabrik dari pemerintah terutama pelayanan yang bersifat administratif. Berdasarkan data topografi yang dimiliki, Kelurahan Maharatu mempunyai bentuk permukaan tanah yang berupa daratan dengan kemiringan 10 derajat. Disamping itu wilayah Kelurahan Maharatu mempunyai area pemukiman, Bandara (Airport), Pangkalan TNI-AU, perdagangan dan areal pertanian

## **TUGAS POKOK**

### **1. Lurah**

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kelurahan meliputi bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan, bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat unsur-unsur organisasi Kelurahan.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan kelurahan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten melalui Camat di bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;

### **4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Kelurahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang ekonomi dan pembangunan;

### **5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten

di bidang Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru yang menganalisa mengenai evaluasi pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Maharatu. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan, meliputi data mengenai pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Maharatu. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis eksploratif yaitu suatu teknik analisa data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal ketepatan aturan dalam pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Maharatu, kemudian untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu dapat dilihat dari hasil Penelitian.

### **Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu**

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut **William Dunn (2008:187)**, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Melalui penelitian ini penulis ingin menganalisa Evaluasi pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui

Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh William N Dunn, yakni : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Keenam indikator tersebut yang akan menjadi alat ukur dalam menganalisa Evaluasi Program RASKIN di Kelurahan Maharatu.

### **Efektifitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Untuk itu, penulis akan menganalisa salah satu indikator yakni efektifitas pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Maharatu dengan melakukan wawancara sebagai berikut :

*“Saya sebagai Kasi Kesejahteraan Masyarakat menjalankan Tupoksi salah satunya sebagai perpanjangan Lurah dalam hal pelaksanaan penyaluran RASKIN ke masyarakat. Data masyarakat yang tergolong miskin yang kami terima berdasarkan pada kriteria masyarakat miskin berdasarkan Pedum RASKIN yang ada selama ini. Namun kami tidak langsung turun ke lapangan, melainkan kami meminta data dari ketua RW dan RT di setiap daerah dalam lingkup Kelurahan Maharatu. Karena menurut kami ketua*

*RW dan RT adalah pejabat kelurahan yang lebih tahu tentang keadaan masyarakatnya". (Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi 16/01/2017)*

Tanggapan yang diberikan oleh Ibu Kasi Kesejahteraan Masyarakat menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program RASKIN wewenang terletak pada kasi Kesejahteraan Sosial. Sehingga segala hal yang menyangkut tentang RASKIN menjadi tanggung jawabnya. Namun, ada kelemahan dalam pendataan masyarakat yang tergolong miskin sebagai penerima RASKIN. Pihak Kelurahan mempercayakan sepenuhnya kepada Ketua RW dan RT untuk mendata masyarakat. Tanpa turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan sewaktu-waktu dalam pendataan masyarakat tersebut. Hal ini bisa memperbesar ruang melakukan penyelewengan bagi Ketua RW dan RT dalam memberi informasi. Sehingga masih sering dijumpai salah sasaran dalam pemberian RASKIN.

*"Kalau dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program RASKIN ini sangat membantu dalam perekonomian. Jadi mereka tidak perlu terlalu pusing memikirkan beras yang harus di beli. Tinggal berfikir bagaimana mencari lauknya saja. Harga yang ditetapkan dari kelurahan Rp.1.600,- tapi memang tidak dapat tiap bulan. Pokoknya tiap bulan setiap KK dapat 5 Kg RASKIN.*

*Dan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan RASKIN karena tergolong miskin, syarat utamanya harus memiliki KK dan KTP Kelurahan Maharatu selain kriteria masyarakat miskin yang ada pada Pedum RASKIN". (Wawancara dengan Lurah Kelurahan Maharatu, Bpk Krisna Minang, SPKP 16/01/2017)*

Dari hasil wawancara dengan Lurah Maharatu diketahui bahwa dari pihak Kelurahan telah menjalankan ketentuan syarat penerima RASKIN adalah masyarakat yang memang telah memiliki identitas lengkap sebagai penduduk di Kelurahan Maharatu. Hal tersebut menjadi syarat penting dalam pendataan masyarakat miskin. Demikian juga dengan harga RASKIN yang disalurkan melalui Kelurahan sebesar Rp.1.600,-, hal ini sudah sesuai dengan Pedum RASKIN. Tapi berbanding terbalik dengan jumlah RASKIN yang didapat tiap KK, dalam Pedum RASKIN tiap bulan setiap KK mendapat 15 kg, tapi dalam kenyataannya dari pihak Kelurahan hanya menyalurkan 5 kg per bulan. Jika di tilik lebih jauh lagi, jumlah RASKIN yang diterima tidak sesuai dengan Pedum RASKIN memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan beras untuk keluarganya. Hal ini menyebabkan program RASKIN terkesan hanya sebatas program saja. Karena dalam prosesnya jauh dari rencana dan tujuan akhirnya tidak akan tercapai secara optimal.

## **Efisiensi**

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

*“Keluarga saya dapat RASKIN karena di data oleh RT sebagai keluarga miskin. Katanya dapat tiap bulan, tapi nyatanya tidak. Kami yang sudah terdata menerima RASKIN memberi Rp.2.500,- untuk satu kilogram beras. Jadi semua tergantung berapa beras yang didapat untuk RT kami dari kelurahan. Kalau sedikit ya bayar sedikit, kalau banyak ya bayar banyak ”.*  
**(Wawancara dengan masyarakat Pekanbaru, Bpk Joko 18/01/2017)**

Berdasarkan wawancara dari beberapa informen diatas, peneliti menganalisa bahwa anggaran untuk program RASKIN tidak tersedia di tiap Kelurahan. Oleh karena itu pihak Kelurahan bekerjasama dengan UEK-SP dalam bidang anggaran agar RASKIN dapat di salurkan dari Bulog. Setelah itu baru menunggu pengembalian dana dari pihak Rt dan RW.

Setelah itu, RT ataupun RW yang bertugas mengurus RASKIN mendapat informasi dari Kelurahan untuk menyalurkan kepada masyarakat. Petugas lalu mulai

mengumpulkan dana untuk pengambilan RASKIN kepada masyarakat setelah sebelumnya mengetahui berapa banyak beras yang didapat untuk tiap RT dan RW. Petugas memungut biaya sebesar Rp. 2.500,- untuk 1 kg beras dengan alasan transportasi pengambilan RASKIN. Sementara biaya di Kelurahan sesuai dengan Pedum RASKIN yaitu Rp. 1.600,- per kilogram beras.

Baru kemudian disalurkan kepada masyarakat yang sudah didata oleh pihak RT dan RW. Karena RASKIN yang disalurkan tidak rutin setiap bulan, maka petugas penyalur RASKIN ke masyarakat hanya menunggu instruksi dari kantor Luah jikan RASKIN sudah di salurkan dari Bulog ke pihak Kelurahan

## **Perataan**

*“Tidak semua warga yang tergolong miskin merasakan program RASKIN, seperti di RT 001 ini, Cuma 20 Keluarga yang mendapatkan RASKIN. Karena syaratnya memang harus punya Kartu Keluarga dan KTP Kelurahan Maharatu. Selain itu, yang menerima harus keluarga yang menetap di daerah ini, pekerjaannya buruh cuci, tukang atau lansia. Padahal kalau ditinjau, banyak Keluarga yang tergolong tak mampu tapi tak bisa dapat RASKIN karena tak punya KTP kelurahan Maharatu”.*  
**(Wawancara dengan Ketua RT 001, Bpk Pompi 18/01/2017)**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Program RASKIN tidak dapat dirasakan oleh

semua keluarga miskin karena tidak punya identitas Kelurahan Maharatu. Karena keluarga tersebut kebanyakan keluarga yang menyewa rumah, sehingga sering berpindah-pindah. Jikalau mereka memiliki identitas, bukan identitas sebagai penduduk tempatan atau penduduk yang masih dalam lingkup kawasan Kelurahan Maharatu.

Pelaksanaan program RASKIN juga menyisakan banyak permasalahan dalam prosesnya. Dimana antara pedoman umum yang di keluarkan pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan masih terdapat perbedaan. Dalam Pedoman RASKIN, setiap bulan RTM mendapat 15 Kg beras dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.600,-, namun dalam kenyataannya penyaluran RASKIN tidak dilaksanakan tiap bulan tetapi 2 sampai 3 bulan sekali dengan jumlah RASKIN yang tidak menentu antara 5-10 kg tiap kali dapat.

## **PENUTUP**

Didalam bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada petugas penyalur Beras Miskin dalam Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu sebagai bahan untuk memberikan masukan lebih baik dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu belum

berjalan dengan optimal dan masih banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program RASKIN tersebut. Penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program RASKIN terlihat dari waktu penyaluran RASKIN yang tidak setiap bulan, jumlah RASKIN yang terima RTM hanya 5- 10 kg setiap periode penyaluran, tidak tersedianya anggaran dalam penyaluran RASKIN, masih banyak keluarga yang tergolong miskin belum terdata dan tidak bisa menerima RASKIN karena tidak memiliki identitas sebagai warga Kelurahan Maharatu, dan masih ada nepotisme yang terjadi dalam pendataan RTM sebagai penerima RASKIN.

2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Maharatu, disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor responsivitas. Dimana tujuan yang di harapkan dalam pelaksanaan program RASKIN adalah mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Namun, pada kenyataannya dalam penyaluran RASKIN tidak sesuai dengan pedoman umum yang telah di tetapkan pemerintah. Baik dari segi jumlah, waktu penyaluran, biaya yang ditetapkan, data RTM yang tidak selalu diperbaharui, serta penyimpangan lain yang dilakukan oleh para penyalur RASKIN.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN di

Kelurahan Maharatu, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam melaksanakan Evaluasi pelaksanaan program RASKIN, implementor yang berperan dalam pelaksanaan penyaluran RASKIN harus memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas. Sehingga jika sudah tertanam rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, maka segala sesuatu akan mencapai tujuan yang diharapkan dan di rumuskan.
2. Dalam upaya mengatasi faktor responsivitas dalam Evaluasi pelaksanaan program RASKIN, maka dalam pelaksanaan program RASKIN harus dilaksanakan sesuai Pedoman Umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tidak terjadi penyimpangan baik dalam pelaksanaan ataupun dari implementor yang berperan dalam pencapaian tujuan RASKIN.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta. Sinar Grafika

Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi,*

*Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia

----- . 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia

----- . 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia

----- . 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

Sugiyono. 2005. *metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman. I 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama

Tachjan 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit Universitas Padjajaran

Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. (YPAPI) Lukman Offset

Pasolong, Harbani. 2008 *Teori Administrasi publik*. Bandung Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*

*Implementasi Kebijakan  
Negara.* Jakarta. Bumi Aksara

William N. 2003. *Analisis Kebijakan  
Publik.* Yogyakarta. Hanandita

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan  
Proses Kebijakan Publik.*  
Yogyakarta. Media Presindo

**Dokumen:**

1. Pedoman Umum RASKIN  
tahun 2015